

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” (Rechtsstaat). Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi warga negaranya. Dalam negara hukum, negara juga mengakui adanya persamaan hak antar setiap individu manusia tanpa membedakan latar belakang satu dengan yang lain, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before The law).² Persamaan di muka hukum juga harus dilindungi dengan persamaan perlakuan (equal treatment).³ Adanya prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan suatu arahan bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagai pelindung masyarakat, terkait erat dengan pembicaraan tentang prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dan prinsip Negara hukum.

Dalam hal ini penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius maka akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yang berarti bertentangan

¹ Mfif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Ham Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum UNISDA, Lamongan, Hlm 161.

² Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Hlm. 97.

³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, Hlm 109.

dengan hak konstitusional warga negara. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Didalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dengan aturan-aturan hukum yang menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP mengangkat dan memposisikan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain KUHAP Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi Warga Negaranya meskipun diduga telah

melakukan tindak pidana, sehingga di tetapkan menjadi tersangka.⁴Dalam hal ini Asas Praduga Tidak Bersalah harus dijunjung tinggi, seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-hak nya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Selain itu untuk menghindari penyimpangan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa membedakan latar belakang. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut “due process of law” atau proses hukum yang adil.⁵

Tidak setiap orang mampu membayar jasa advokat/penasihat hukum untuk memperoleh bantuan hukum, dengan adanya ketentuan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum

⁴Teguh Samudra,2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hlm 2.

⁵ Yudha Pandhu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*,PT.Abadi,Jakarta,Hlm.43.

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Bunyi pasal ini mengatur mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya bagi setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih wajib di dampingi oleh penasihat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu secara ekonomi untuk membayar jasa penasihat hukum tentunya pengadilan berhak dan berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana.

Walaupun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktek nya penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih memprihatinkan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu tidak memberikan jaminan perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana. Menurut M.Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana bunyi dalam Pasal 114 KUHAP.⁶

Fakta lain yang terjadi dilingkungan peradilan adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam bentuk kekerasan

⁶ M.Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan : Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, PT.Pusaka Buku, Jakarta, Hlm.15.

fisik, psikis, mental, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu contoh terjadi pada tersangka SUPRIYANTO dalam kasus Pembunuhan isteri perwira Polda Kepulauan Riau, SUPRIYANTO bersama 9 (sembilan) orang satpam lainnya dituduh terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Fakta yang mengejutkan dalam mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) kepada tersangka SUPRIYANTO ternyata aparat penegak hukum sering melakukan kekerasan, seperti disiksa agar tersangka SUPRIYANTO memberi pengakuan terlibat dalam pembunuhan putri Mega Umboh isteri Kasat Krimsus Polda Kepulauan Riau. Selain itu hak atas bantuan hukum, penyidik sering melarang tersangka untuk menggunakan pengacara sendiri, Polisi tidak menyediakan pengacara bagi tersangka meskipun ancaman hukumannya lebih dari 5(lima) tahun.⁷

Melihat fakta yang terjadi di Riau tersebut, bahwa penegakan hukum belum dilakukan secara optimal. Pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik yang merupakan instrumen penegak hukum, namun justru kepolisian melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dengan melakukan penganiayaan, melakukan pemaksaan untuk mendapatkan kesaksian tersangka secara paksa dan melarang tersangka untuk menggunakan pengacara sendiri sesuai dengan keinginan penyidik dengan tidak berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah di atur dengan jelas tentang hak-hak tersangka yang dimana diharapkan dapat

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eeac8495dd74/lima-bentuk-pelanggaran-kuhp-yang-dominan>. Diakses pada tanggal 22 September 2017, Pkl. 16.00 WIB.

mengatur tentang perlakuan pihak kepolisian yang diberikan kepada tersangka agar menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan yaitu :

1. Bagaimana upaya Polisi dalam menerapkan Pasal 56 angka (1) bagi tersangka di Polresta Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Polisi dalam penerapan Pasal 56 angka (1) dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan Polisi dalam menerapkan Pasal 56 Ayat (1) terhadap tersangka di Polresta Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang faktor apa saja yang menghambat Polisi di Polresta Yogyakarta dalam penerapan Pasal 56 Ayat (1) dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengeketa hukum pada khususnya yaitu

bagaimana peranan yang ada dalam proses pidana, khususnya yaitu peran penyidik dalam memenuhi hak tersangka.

- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan perubahan mengenai cara pandang dan berfikir penulis serta dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan pengetahuan hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melaksanakan hak-hak bagi tersangka tetap berpedoman pada undang-undang yang mengaturnya serta tetap dapat menjaga hak-hak tersangka sebab negara kita menggunakan hukum positif yang memberlakukan asas persamaan dimuka hukum sehingga tersangka tidak hanya dijadikan objek hukum melainkan subjek hukum dimana harkat serta martabatnya harus tetap dilindungi

- b. Untuk memberikan masukan bagi keluarga pelaku tindak pidana agar tetap melakukan kontrol terhadap proses pidana yang dilakukan oleh anggota keluarganya sebagai pelaku tindak pidana
- c. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat agar dapat mengerti bahwa hak setiap orang tetap dijaga baik seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum maupun tidak melakukan perbuatan melawan hukum

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

1. Teguh Mukti Santoso Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2011
 - a. Judul : Pelaksanaan Penyidikan Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan
Tindak Pidana.
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Hal-hal apakah yang menunjukkan proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana sudah bersifat obyektif?
- 2) Kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana

c. Hasil penelitian :

- 1) Setiap ada laporan atau pengaduan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana selalu di tindak lanjuti ke proses hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan, proses penyidikan selalu dilakukan dengan tepat waktu apabila cukup bukti berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan. Adanya tuntutan hukuman setimpal bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, putusan hakim di pengadilan yang tidak menimbulkan reaksi dari korban maupun keluarga korban yang menganggap terdakwa sudah menerima hukuman yang layak.
- 2) Adanya semangat membela institusi sebagai kultur yang masih kuat di setiap institusi penegak hukum sehingga sulit untuk berharap penyidik polisi akan bertindak obyektif. Apabila terhadap kasus yang pelakunya adalah senior dari penyidik maka rasa sungkan atau enggan masih melekat. Masih sering munculnya sikap toleransi antar sesama

kolega. Adanya sikap senioritas dan senantiasa menampilkan rasa setiakawanan dengan sesama anggota polri. Masih ada pendapat ataupun pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap proses penyidikan bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, masih sering ditemukannya sikap antagonis dari masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2. Dewi Maria Irastile Keban Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2012

- a. Judul : Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapat Kekerasan Fisik

Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

- b. Rumusan Masalah : Apakah Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan Fisik Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Yogyakarta Sudah Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia?

- c. Hasil penelitian :

- 1) pihak kepolisian resort yogyakarta merasa bahwa dalam proses penyidikan, penyidik telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia serta memperhatikan hak-hak tersangka.

- 2) Perbedaan perlakuan menjadi menjadi pemicu utama ketidakadilan yang terjadi antara tersangka laki-laki dan tersangka perempuan. Tersangka laki-laki cenderung lebih sering mendapat ancaman diskriminatif dan kekerasan fisik dari pihak penyidik di kepolisian Resort Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tersangka wanita. Faktor penyebab terjadinya tindakan diskriminatif dan kekerasan fisik yang sering tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terhadap pihak penyidik, adanya usaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan serta adanya perlawanan fisik yang dilakukan tersangka laki-laki kepada pihak penyidik, sebaliknya tersangka wanita jarang mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik karena adanya faktor kelemahan wanita yang tidak melakukan perlawanan serta tubuh dan paras yang menawan sehingga dapat memberikan dampak positif dalam bentuk tersangka wanita jarang mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik dari pihak penyidik dalam proses penyidikan.
- 3) Selain itu terdapat perlakuan diskriminatif lain dalam proses penyidikan seorang tersangka baik wanita maupun laki-laki, yaitu tidak terpenuhinya hak untuk

memberikan keterangan secara bebas karena tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum baik dari lembaga bantuan hukum maupun jasa advokat.

3. Sinar Doharta Ginting Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Tahun 2011

- a. Judul : Peranan Hakim Pra-peradilan Dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana.
- b. Rumusan Masalah: Bagaimana hakim pra peradilan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana
- c. Hasil penelitian: Peranan hakim adalah memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan, dan dalam hal sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan oleh tersangka, keluarganya dan pihak lain atas kuasanya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 79,80,81 kitab Undang-Undang Hukum Pidana berhak meminta ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Sehubungan dengan itu dalam hal penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau penyidik atau penuntut umum.

F. Batasan Konsep

1. Hak

Pengertian hak pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah : Seperangkat hak yang

melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Tersangka

Pengertian Tersangka pada Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah :
Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

3. Penyidikan

Pengertian Penyidikan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :
Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.

4. Penyidik

Pengertian penyidik pada Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah : Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan.

5. Lembaga Bantuan Hukum

Suatu lembaga yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

6. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non hukum).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan-non-hukum).

a. Data Sekunder dari penelitian ini berdasar dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adokat
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Palaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil, penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku, buku literature dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Iptu. Hari Subagyo sebagai penyidik kepolisian Polresta Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normative yaitu :

a. Deskripsi Hukum Positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai bahan Hukum Primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematika Hukum Positif

- 1) Secara vertikal, Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi
- 2) Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan Perundang-Undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji yang bertumpu pada asas hukum. Dalam hal ini pemenuhan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka harus diberikan sejak pemeriksaan pertama agar penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/ bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan data lapangan yang diperoleh di kepolisian terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun. Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh hasil penelitian mengenai penerapan pasal 56 ayat (1) KUHP Tentang Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta.

5. Proses Berfikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan Skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang penerapan Pasal 56 ayat 1 KUHP

tentang pemenuhan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Latar belakangnya adalah walaupun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, namun dalam prakteknya penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih memprihatinkan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu tidak memberikan jaminan perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana. Menurut M. Sofyan Lubis Lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana bunyi dalam pasal 114 KUHAP.

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub isu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang pemenuhan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas (3) tiga bab yaitu Bab I

Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi tentang Penerapan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Tentang Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.